

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

Efriyanti*

Dr. Bina Era Dany, S.Sos, SH. M.H**

Dr. Marlina, S.H.,M.Hum**

ABSTRAK

Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terus mengalami peningkatan tahun demi tahun, karena semakin kompleks faktor yang memicu terjadi KDRT diantaranya : faktor ekonomi, kemacetan lalu lintas yang menimbulkan kelelahan, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke kepolisian akan diproses di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn adalah Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Rumah Tangga

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN
VICTIMS OF PHYSICAL VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD
(Case Study of Decision Number 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

Efriyantl*

Dr. Bina Era Dany, S.Sos, SH. M.H**

Dr. Marlina, S.H.,M.Hum**

ABSTRACT

Domestic Violence (DV) cases continue to increase year after year, due to the increasingly complex factors that trigger domestic violence, including: economic factors, traffic jams that cause fatigue, and increasing demands for living needs. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law on criminal acts of physical violence against children in the household, How is the legal protection for child victims of domestic violence, How are the judge's legal considerations in making decisions on cases of criminal acts of physical violence against children in the household based on the decision of case Number 1189 / Pid.Sus / 2024 / PN Mdn.

This study uses a descriptive method through a normative approach (legal research) to obtain secondary data. This study uses materials obtained from the results of library research. From library research, secondary data was collected which included primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The legal provisions for the crime of physical violence against children in the household are regulated in Article 44 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has been fulfilled and the defendant has been declared legally and convincingly proven to have committed the crime as charged in the single indictment. Legal protection for victims of domestic violence reported to the police will be processed in the Special Service Room (RPK).

The results of the study show that the judge's legal considerations in passing a verdict on a case of domestic violence based on the decision of case Number 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn are that the Panel of Judges did not find anything that could eliminate criminal responsibility, either as a justification and/or excuse, then the defendant must be held accountable for his actions with imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months

Keywords: Criminal Acts, Violence, Household

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

****Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*